

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai bencana yang terjadi selain disebabkan oleh alam banyak pula yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak segan-segan manusia mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan. Menurut Laksmi (Setyawati Yuni Irianti, 2008: 5) kecepatan manusia mengeksploitasi sumber daya alam dan hayati jauh lebih besar dari pada kecepatan sumber daya alam memperbaharui diri.

Kementerian Kehutanan mencatat luas hutan di Indonesia menyusut setiap tahun. Hal ini terjadi akibat pembakaran hutan, *illegal logging* dan alih fungsi hutan yang terus meningkat. Hingga tahun 2009 kerusakan hutan mencapai lebih dari 1,08 juta hektar per tahun (Sri Lestari, 2010 diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/). Kecepatan kerusakan hutan ini tidak sebanding dengan usaha dan kemampuan untuk mengembalikan lahan rusak dengan menanam pohon yang hanya sebesar 0,5 juta hektar per tahun (Amir Sarifudin, 2010 diakses dari <http://news.okezone.com/>).

Sampah merupakan sumber lain kerusakan lingkungan. Pembuangan sampah yang tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*), atau kebocoran minyak, zat kimia, atau limbah yang tumpah kemudian masuk ke dalam tanah menyebabkan terjadinya pencemaran tanah (Asep Sofyan, 2008 diakses dari <http://personal.ftsl.itb.ac.id/>).

Sampah yang menumpuk tak hanya turut andil dalam kerusakan lingkungan tetapi juga dapat membahayakan keselamatan manusia. Sebagai

contoh adalah kasus meledaknya gunung sampah di TPA Leuwigajah Bandung pada 21 Februari 2005 yang diduga penyebabnya adalah gas metan. Menurut prediksi ilmuwan gas metan memiliki kekuatan 20 kali lipat lebih besar dibandingkan karbondioksida, sehingga gas ini berbahaya apabila tidak dikelola dengan baik (Asep Sofyan, 2008 diakses dari <http://personal.ftsl.itb.ac.id/>).

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2000 rata-rata produksi sampah masyarakat Indonesia per orang mencapai 1 kg sampah per hari. Tahun 2020 jumlah sampah diperkirakan meningkat menjadi 2,1 kg per orang per hari sehingga total sampah yang dihasilkan mencapai 500 juta kg/hari atau 190.000 ton/tahun. Jika setiap 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metan, berarti total gas metan yang dihasilkan mencapai 9.500 ton per hari (Joanito De Saojoao, 2010 diakses dari <http://suarapembaruan.com/>).

Sampah tak hanya menyebabkan pencemaran tanah. Sampah yang dibuang begitu saja ke badan sungai dapat menyebabkan pencemaran air. Di Indonesia, sebanyak 64 dari total 470 Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam kondisi kritis. Kualitas air sungai yang buruk ini pada umumnya dipengaruhi oleh limbah domestik (rumah tangga), limbah industri, limbah pertanian maupun peternakan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan (Walhi, 2009 diakses dari <http://www.walhi.or.id/>; Asep Sofyan, 2008 diakses dari <http://personal.ftsl.itb.ac.id/>).

Melakukan aktivitas yang banyak menghasilkan asap seperti memperlakukan sampah dengan cara dibakar, melakukan pembakaran hutan, menggunakan kendaraan yang menghasilkan banyak asap, dan aktivitas pembakaran di pabrik merupakan bentuk-bentuk aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti ini

menyebabkan kualitas udara menurun (Asep Sofyan, 2008 diakses dari <http://personal.ftsl.itb.ac.id/>). Tercemarnya udara dapat menyebabkan dampak kesehatan serius, menyebabkan asap dan hujan asam, produksi pangan menurun akibat terganggunya pertumbuhan tanaman, mengurangi daya perlindungan lapisan ozon di atmosfer bagian atas, dan berpotensi untuk turut berperan dalam perubahan iklim dunia. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global (Indonesia Children, 2010 diakses dari <http://korananakindonesia.wordpress.com/>).

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Bumi telah mencapai taraf yang kritis. Matahari yang dahulu merupakan sahabat, saat ini telah menjadi musuh makhluk hidup di Bumi. Sinar (cahaya) dan panas (energi) yang dipancarkan matahari tidak dapat dipantulkan kembali oleh Bumi akibat pencemaran udara yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Udara yang tercemar ini mengandung kumpulan gas yang terdiri dari CO₂, NO₂, O₂, SO₂, dan uap air yang dikenal dengan istilah gas rumah kaca (Mohamad Soerjani, 2009: 72). Gas rumah kaca yang terkumpul menyerupai rumah kaca di atmosfer ini mengembalikan refleksi panas Matahari (radiasi infra merah) dari Bumi kembali ke Bumi yang mengakibatkan pemanasan Bumi (*global warming*) (Ayu Rini, 2008: 118; Mohamad Soerjani, 2009: 73).

Berdasarkan data dari PBB, diperkirakan emisi karbondioksida global pada tahun 2006 tidak termasuk alih guna lahan sebesar 30.200.000.000 ton (Untung Widyanto, 2010: C5). Dalam laporan yang dikeluarkan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) mengatakan bahwa 90 persen aktivitas manusia selama 250 tahun terakhir membuat Bumi semakin

panas. IPCC juga menyimpulkan bahwa 90 persen gas rumah kaca yang dihasilkan manusia seperti karbondioksida, metana, dan dinitrogen oksida, telah secara drastis menaikkan suhu bumi yang mengakibatkan dampak negatif bagi manusia dan makhluk hidup lainnya di Bumi (A Helmi Faishal Zaini, 2010: 4).

Kerusakan lingkungan hidup sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia. Perilaku hidup manusia yang lalai, egois dan tidak bertanggung jawab dalam mengeksploitasi lingkungannya termasuk sering diabaikannya kepentingan pelestarian lingkungan hidup di tingkat pengambil keputusan menandakan adanya masalah degradasi moral (Danny Setiawan, 2010 diakses dari <http://majalah.p4tkipa.org/>). Moral yang buruk mengakibatkan kondisi lingkungan hidup semakin kritis dan akhirnya merugikan manusia itu sendiri.

Permasalahan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan secara teknis semata, namun yang lebih penting adalah pemecahan yang dapat mengubah mental serta kesadaran akan pengelolaan lingkungan. Untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan hidup diperlukan suatu perubahan sikap dan perilaku pada masyarakat serta perbaikan moral melalui pendidikan (Danny Setiawan, 2010 diakses dari <http://majalah.p4tkipa.org/>).

Pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan fisik, daya jiwa (akal, rasa dan kehendak), sosial dan moralitas manusia serta merupakan alat terpenting untuk menjaga diri dan memelihara nilai-nilai positif (Danny Setiawan, 2010 diakses dari <http://majalah.p4tkipa.org/>; Nurul Zuriah, 2007: 7). Tentunya dengan pengaruh yang ditimbulkan pendidikan ini memberikan dampak pada bertambahnya pengetahuan dan keterampilan serta akan menolong dalam pembentukan sikap yang positif (Johosua Doda, 1989: 196). Hal yang hampir senada juga disampaikan Kneller (Sumitro dkk, 2006: 16-17) bahwa pendidikan

memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan suatu tindakan atau pengalaman yang mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan jiwa, watak, atau kemampuan fisik mereka melalui lembaga-lembaga pendidikan yang dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan dari generasi ke generasi. Hendri Bastaman (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009: ii-iii) berharap melalui pendidikan lingkungan masyarakat dapat turut serta melaksanakan upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup dengan mengembangkan sikap, bentuk-bentuk perilaku, kemampuan sosial dan kemampuan individu yang mencintai lingkungan.

Pendidikan lingkungan hidup di sekolah merupakan salah satu dari penerapan pendidikan karakter. Pendidikan karakter dan pendidikan lingkungan hidup menanamkan nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan (kognitif), kesadaran atau kemauan (afektif), dan tindakan (psikomotor) untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut (Agus Akhmadi, 2011: 1-3).

Di Indonesia, tujuan mulia dari pendidikan lingkungan hidup ini ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tahun 1977 LIPI membentuk Tim Pendidikan Nasional yang terdiri dari Tim untuk Pendidikan Formal (Prof. Dr. Soedjiran Resosudarmo) dan Tim untuk Pendidikan Nonformal (Dr. Setiati Sastrapraja). Pada tahun 1982 dilakukan uji coba terhadap 15 SD negeri/swasta serta Pelaksanaan Program Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) melalui proyek perintis SD, SMP, SMA. Namun, uji coba ini mengalami kegagalan karena belum menjangkau semua guru, kurangnya buku untuk guru dan murid serta penilaian pengembangan *affective domain* belum merupakan bagian dari sistem penilaian hasil pendidikan di sekolah.

Menurut Henry Bastaman (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009: ii) pada tanggal 21 Mei 1996 diadakan kesepakatan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Kemudian tanggal 19 Februari 2004 Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) bersama-sama dengan Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri menetapkan Kebijakan PLH sebagai dasar arahan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan dan pengembangan PLH di Indonesia. Usaha yang dilakukan ini dianggap belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam melakukan tindakan yang menguntungkan atau berpihak pada lingkungan hidup dan masyarakat. Masing-masing pemangku kepentingan melaksanakan kegiatan pendidikan lingkungan hidup secara parsial dan mengukur kinerja keberhasilan berdasarkan perspektif masing-masing.

Untuk menyikapi masalah tersebut dan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman lingkungan hidup kepada peserta didik dan masyarakat, maka tanggal 3 Juni 2005 ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional. Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka pendidikan lingkungan harus berdasarkan konsep dasar makna lingkungan hidup. Untuk merealisasikan kesepakatan ini maka tanggal 21 Februari 2006 dicanangkan program Adiwiyata. Program Adiwiyata ini adalah sebagai salah satu strategi pemberian pendidikan lingkungan yang dilakukan pemerintah dengan maksud agar tercipta sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Program Adiwiyata yang dicanangkan pemerintah ternyata belum banyak diketahui oleh masyarakat, tidak memiliki intensif materi dan dianggap hanya sebagai pemberian penghargaan semata. Pada tahun 2009 lebih dari 300 sekolah yang meliputi 29 provinsi telah berpartisipasi dalam program Adiwiyata namun, jumlah ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah sekolah di Indonesia yang mencapai 327.233 sekolah (data berasal dari NPSN tanggal 22 Oktober 2010). Kemudian wawancara yang dilakukan peneliti pada beberapa mahasiswa dan masyarakat awam (bukan dari kalangan pendidik) diketahui bahwa mereka tidak mengetahui apa itu program Adiwiyata, bahkan istilah itu baru mereka dengar.

Menurut Henry Bastaman (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009: ii) program Adiwiyata tidak memiliki intensif materi dan hanya diperuntukan bagi sekolah-sekolah yang bersedia secara sukarela. Hal ini menimbulkan kesulitan pihak sekolah dalam melaksanakan program Adiwiyata karena tidak adanya kurikulum khusus untuk pendidikan lingkungan hidup. Pengakuan serupa disampaikan Tety Suryati, salah satu guru dari SMAN 12 Jakarta yang sekolahnya kini sedang menerapkan dan mengembangkan PLH sebagai muatan lokal. Hingga saat ini sekolahnya masih mengalami kesulitan untuk mengajukan diri sebagai calon model sekolah Adiwiyata. Ia juga mengeluhkan tidak adanya kurikulum khusus untuk pendidikan lingkungan hidup sehingga sekolah mereka memutuskan untuk memasukkannya sebagai muatan lokal yang berdurasi 2 jam pelajaran dalam setiap minggunya. Antusiasme terhadap pentingnya Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) ini terlihat tak seimbang. Terkesan program Adiwiyata lebih sebagai sebuah bentuk penghargaan saja dan bukan sebagai sebuah

program pembinaan yang berkelanjutan (Ayu N Andini, 2007 diakses dari <http://plhjabar.wordpress.com/>).

Program Adiwiyata dalam praktiknya masih banyak mengalami kendala, namun pemerintah menganggap bahwa program yang dijalankan telah berhasil melakukan fungsinya. Pada tanggal 1 Februari 2010 dilaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MOU) antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Tujuan utama dari kesepakatan ini adalah agar Pendidikan Lingkungan Hidup dapat terintegrasi dalam kurikulum pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan perubahan perilaku peserta didik menjadi ramah lingkungan (Henry Bastaman, 2010 diakses dari <http://www.menlh.go.id/>). Pendidikan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan nasional tentunya mempengaruhi perkembangan siswa baik bidang akademis, sosial maupun pribadi. Oleh karena itu siswa diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan yang sedang berlangsung (Saring Marsudi, 2003: 76).

Bimbingan dan konseling merupakan salah satu bidang kegiatan pendidikan terkait dengan program pemberian bantuan kepada peserta didik (siswa) dalam upaya mencapai perkembangan yang optimal, melalui interaksi yang sehat dengan lingkungannya (Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan, 2005: 5). Selain menjadi fasilitator bagi individu, bimbingan dan konseling mempunyai fungsi sebagai fasilitator bagi lembaga (Tijdan dkk, 1993: 65). Hal ini sejalan dengan pendapat Bimo Walgito (2010: 44) yang menyebutkan bahwa tugas seorang pembimbing di sekolah adalah membantu kepala sekolah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sekolah secara keseluruhan sehingga bidang gerakannya tidak terbatas pada pemberian bantuan kepada anak didik saja, akan

tetapi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Departemen Pendidikan Nasional dalam “Penataan pendidikan profesional konselor dan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal” (2008: 212) menyebutkan bahwa dukungan sistem merupakan salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling berupa komponen dan kegiatan pengembangan jejaring (*networking*), kegiatan manajemen, serta riset dan pengembangan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Program ini memberi dukungan konselor dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan dasar, pelayanan responsif dan perencanaan individual serta untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah bagi personel pendidikan lainnya. Melalui dukungan sistem memungkinkan guru pembimbing memahami program Adiwiyata secara lebih luas dan mendalam untuk mengembangkan program bimbingan dan konseling yang sesuai dengan tujuan sekolah sehingga dapat membantu seluruh warga sekolah.

Peneliti tidak menemukan penelitian mengenai deskripsi sekolah yang sukses menerapkan program Adiwiyata. Padahal penelitian mengenai hal ini penting untuk dapat membantu seluruh warga sekolah dan untuk mengembangkan program bimbingan dan konseling sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang peduli dan berbudaya lingkungan sehingga memerlukan sebuah model sekolah yang telah mencapai kesuksesan dalam sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Sekolah Adiwiyata).

SMP Negeri 2 Ciamis merupakan salah satu sekolah penerima penghargaan Adiwiyata Mandiri yang patut diteladani namun belum

terinformasikan kepada masyarakat luas. Walaupun program Adiwiyata belum banyak diketahui masyarakat dan banyak sekolah mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, namun SMP Negeri 2 Ciamis berhasil menerapkan pendidikan lingkungan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah dan menciptakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama seluruh warga sekolah. Bagaimana seluruh warga sekolah mengerti, memahami dan menerapkan perilaku yang peduli lingkungan baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari organisasi sekolah. Diharapkan dengan memahami peranan masing-masing warga sekolah dapat meningkatkan kepedulian dan menciptakan budaya cinta lingkungan bagi masyarakat secara luas serta meningkatkan profesionalisme guru bimbingan dan konseling untuk lebih sensitif terhadap isu-isu baru.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kerusakan lingkungan telah mencapai taraf yang kritis.
2. Kerusakan lingkungan hidup sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia yang terjadi akibat terjadinya degradasi moral.
3. Tujuan pendidikan lingkungan hidup pada kenyataannya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan.
4. Program Adiwiyata yang dicanangkan pemerintah ternyata belum banyak diketahui masyarakat, tidak memiliki intensif materi dan dianggap hanya sebagai pemberian penghargaan semata.

5. Belum ada deskripsi mengenai peranan warga sekolah dalam menyukseskan program Adiwiyata.
6. Program Adiwiyata di SMP Negeri 2 Ciamis telah dilaksanakan dengan baik namun belum terinformasikan kepada masyarakat luas.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah sering juga disebut fokus masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian yang fokus dan optimal serta adanya keterbatasan tenaga, waktu dan biaya yang dimiliki peneliti maka peneliti membatasi masalah penelitian yang muncul dalam identifikasi masalah. Dari beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, peneliti membatasi masalah penelitian pada pentingnya mendeskripsikan peranan warga sekolah dalam menyukseskan program Adiwiyata.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah peranan warga SMP Negeri 2 Ciamis dalam menyukseskan program Adiwiyata?

E. Tujuan Penelitian

Adapun pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan warga SMP Negeri 2 Ciamis sebagai sekolah yang sukses menerapkan program Adiwiyata.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori tentang pendidikan lingkungan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan baik dari sisi komite sekolah, kepala sekolah, guru wali, guru pelajaran, guru bimbingan dan konseling, karyawan sekolah, hingga siswa.

2. Manfaat praktis

a. Bagi guru bimbingan dan konseling

Sebagai sarana untuk penelitian dan pengembangan bimbingan dan konseling dalam bidang pendidikan lingkungan serta meningkatkan profesionalisme guru bimbingan dan konseling untuk lebih sensitif terhadap isu-isu baru.

b. Bagi warga sekolah

Sebagai bahan evaluasi warga sekolah apakah selama ini telah menjalankan peranannya dengan baik dalam upaya menerapkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

c. Bagi masyarakat secara luas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana mengelola lingkungan dengan lebih baik melalui cara-cara yang lebih efektif.

d. Bagi pembuat kebijakan atau pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan atau pemerintah dalam

mengembangkan dan menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup di sekolah.

e. Bagi penelitian selanjutnya

Memberikan dasar bagi pengembangan penelitian selanjutnya mengenai program Adiwiyata yang lebih mendalam dan lebih komprehensif serta cara pelestarian lingkungan hidup yang lebih praktis.

G. Batasan Istilah

Untuk menghindari timbulnya kesalahan persepsi terhadap istilah-istilah pokok dalam penelitian ini maka perlu diberi batasan sebagai berikut:

1. Peranan warga sekolah adalah tindakan yang dilakukan anggota sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, tenaga pendukung, wali kelas, komite sekolah serta siswa dalam suatu peristiwa tertentu.
2. Sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Sekolah Adiwiyata) adalah sekolah yang mengikuti program Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.